UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019

**Restu Okta Viandi¹, Tubagus M Nasarudin¹,
dan Andre Pebrian Perdana¹**

**¹Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung
Email : restuoktaviandi219@gmail.com, *tbnasarudin@gmail.com,
andrepebrian@malahayati.ac.id,**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran komisi pemilihan umum Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pemilihan Umum Serentak 2019 dan apa saja kendala komisi pemilihan umum di kota Bandar Lampung untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di pemilu sebelumnya. Yang mana Pilpres 2019 merupakan perdana dilakukannya pemilu serentak di seluruh Indonesia dan dapat melebihi target nasional KPU itu sendiri, tetapi mengapa pada pemilu sebelumnya KPU tidak bisa mencapai target ataupun melebihi target seperti pilpres 2019 yang lalu. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum serentak 2019 yang lalu bahwa selain adanya peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilu serentak 2019 yang lalu di pengaruh adanya putusan Mahkamah Konsitusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 210 ayat 1 terkait aturan batas maksimal diperbolehkan pemilih pindah TPS. Melalui mengurus surat yang nama nya A5. Ada 4 komponen perilaku pemilih dalam riset KPU Kota Bandar Lampung sendiri pada Pilgub 2018 yang menjadi hambatan di Pemilu sebelumnya.

Kata Kunci : Pemilihan Umum Serentak 2019, Partisipasi, Komisi Pemilihan Umum

Abstract

This study aims to find out how the role of the Bandar Lampung electoral commission in increasing public political participation in the 2019 Simultaneous Elections and what are the constraints of the electoral commission in bandar lampung to increase public political participation in previous elections. Which is the 2019 presidential election is the first simultaneous elections throughout Indonesia and can exceed the national target of the KPU itself, but why in the previous elections kpu could not reach the target or exceed the target like the last presidential election in 2019. The result of this research is the Role of the Bandar Lampung City Election Commission in increasing public political participation in the 2019 concurrent elections that in addition to the increase in public political participation in the 2019 concurrent elections, under the influence of the ruling of the Supreme Court of Law No. 7 of 2017 on the election of article 210 paragraph 1 related to the maximum limit rules allowed voters to move TPS. Through taking care of a letter whose name is A5. There are 4 components of voter behavior in the research of KPU Bandar Lampung itself in the 2018 Elections that became obstacles in the previous election.

Keywords: *Simultaneous Elections 2019, Participation, Electoral Commissio*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang menguasai pemerintahannya berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, maka sebab itu dilakukan nya pemilihan umum. Kemudian pemilihan umum ini diartikan atau sebagai proses pemungutan suara dimana semua warga Negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin. Pada pemilihan umum 2019 yang lalu menjadi bagian penting dari Pemilihan Umum itu sendiri dan merupakan pemilihan umum serentak dan pertama di Indonesia dalam sejarah. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu serentak 2019 menjadi sejarah dan momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sejarah digelarnya pemilu serentak Tahun 2019 di indonesia berawal dari aksi seorang Effendi Ghazali dan koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak Tahun 2019. Pada Tahun 2013, peraih gelar Ph.D., itu dalam bidang komunikasi politik dari Radbound Nijmegen University Belanda ini menggugat Undang-undang Nomor 42/2008 tentang pilpers ke Mahkamah Konsitusi dan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan mengeluarkan Undang-undang yang di gugat oleh Effebedi Ghazali pada bulan mei 2013 tetapi baru resmi di sidangkan pada januari 2014. Kemudian pemilu serentak itu baru bisa dilaksanakan pada Tahun 2019, bukan untuk Pemilu 2014 dengan alasan waktu yang terlalu cepat pada saat itumenjelang pemilu 2014. Maka sebab itu, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Pemilu 2019 pun tercatat dalam sejarah sebagai pemilu serentak pertama diIndonesia.(<https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>, di akses Rabu 23 Maret 2020 jam 8:30 WIB).

Kemudian untuk melaksanakan sesuai yang tertulis di dalam pasal 1 ayat 2 Undang- undang Dasar Tahun 1945 tersebut di dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan umum yang dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) yang mengutamakan nasional, tetap,

dan mandiri. Sifat nasional merupakan atau mencerminkan wilayah kerja dan tanggung jawab KPU di wilayah indoneisa. Sifat tetap merupakan KPU lembaga yang menjalankan tugas berkelanjutan karena disetujui oleh masa jabatan. Sifat mandiri menjelaskan KPU dalam pemilihan umum bebas dari partisipasi pihak manapun. Dan KPU adalah lembaga Negara yang sifatnya independen dan yang mengatur pemilihan umum di Indonesia, dari pemilihan umum Anggota DPR / DPD / DPRD, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. (Id.m.wikipedia.org Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di akses senin 4 Mei 2020 jam 22:00 WIB)

Pemilu adalah suatu kebijakan politik untuk dan mengartikan aspirasi dan kepentingan warga negara yang berkaitan dengan pemilihan politik yang legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elit politik, dan pendidikan politik. Melalui pemilu legitimasi pemerintah/pengusaha dikukuhkan karena keduanya berlandaskan sepenuhnya pada aspirasi rakyat dan bukan karena pemaksaan dari atas. Selanjutnya, melalui pemilihan kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan lebih adil karena partisipasi warga negara. Praktek demokrasi moderen, yaitu melalui perwakilan dapat dilakukan sepenuhnya disini secara langsung. Dengan demikian pemilu pula akan terjadi pergantian elite kekuasaan secara lebih adil sesuai dengan paham demokrasi yang di anut oleh Indonesia di Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Karena warga negaralah yang ikut turut serta menentukan langsung siapa dan yang tidak masih memenuhi persyaratan. Kontrol negara kepada pejabat resmi. Kemudian akhirnya pemilu adalah sebuah mekanisme atau alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negaranya agar mereka dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu, diharapkan bahwa warga negara akan mendapatkan pengalaman langsung bagaimana selayaknya seorang warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi. Ia akan mengerti dan memutuskan posisinya sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negaranya. (Hakim, 1999:16-17).

Maka dari itu penelitian ini dalam hal partisipasi politik merupakan aspek yang penting dalam negara melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat merupakan aspek penting dalam

tatanan Negara demokrasi. Dalam hubungan dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. setiap masyarakat memiliki referensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. (Jurnal Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat, Daud M. Liando 2016, di akses kamis, 25 June 2020, jam 20:00 WIB)

Berikut adalah data penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan terkait dengan penelitian yang sekarang sedang penulis peneliti:

Tabel 1.1 Presentase dan jumlah partisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung

No	Pemilu	Partisipasi	Target	Keterangan
1	Pilpres 2014	74,55%	75%	Tidak Memenuhi
2	Pilwaket 2015	66,63%	70%	Tidak Memenuhi
3	Pilgub 2018	73,2%	75%	Tidak Memenuhi
4	Pilpres 2019	88,61%	77%	Melewati Target

(Sumber Skripsi Dengan Judul Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019 oleh Anisa Putri 2019)

Dilihat dari data diatas presentase tingkat partisipasi pemilih masyarakat kota Bandar lampung mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target KPU itu sendiri, yang menarik disini pesta demokrasi tahun 2019 lalu telah usai, namun masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama bagi pihak penyelenggara yaitu komisi pemilihan umum dan lembaga pengawas badan pengawas pemilihan umum. Tahun 2020 ini masih ada lagi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di 8 daerah kabupaten/kota provinsi lampung. untuk itu kpu kota Bandar lampung menargetkan tingkat partisipasi nasional dalam pemilu sebanyak 77%. Kemudian parameter yang bisa mencapai tingkat pemilu 2019 melebihi nasional, dimana 82% lebih

tinggi dari tingkat partisipasi politik masyarakat Bandar Lampung saat itu. Tetapi ada catatan pada pemilu 2019 itu untuk pertama kali digabung antara legislative dan presiden.

(Lampungpro.co/POST/25242/dialog-proyekai-politik-2020-kpu-bandar-lampung-memaksimakan-partisipasi-masyarakat-di-pilkada di akses senin 2 Mei 2020 Jam 22:30 WIB)

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama Bagaimana peran komisi pemilihan umum kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di pemilihan umum serentak 2019?, kedua apa saja kendala komisi pemilihan umum di kota Bandar Lampung untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di pemilu sebelumnya?

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan kota terbesar di provinsi Lampung. Dengan kepadatan 5.332/km², Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat kedua di pulau Sumatra setelah Medan, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat di luar pulau Jawa. Kota Bandar Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung terletak di Jl. Pulau Sebesi No.90, Sukarame, Kota Bandar Lampung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

1. Kelembagaan KPU Kota Bandar Lampung

KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari 2 unsur yaitu :

1. Komisioner KPU yang terdiri dari 5 orang yang dikordinasi oleh 1 orang ketua dan empat orang anggota.
2. Unsur kesekretariatan dipimpin oleh Sekertaris KPU Kota Bandar Lampung.

Kedua Unsur tersebut merupakan satu kesatuan, dimana komisioner melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu dan unsur sekretariat membantu

komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan administrasi umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota maka struktur KPU Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Sekretaris
2. Sub Bagian Program dan Anggaran
3. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
4. Sub Bagian . Teknis Pemilu & Hupmas
5. Sub Bagian Hukum

Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik, Umumnya para ahli mendefinisikan, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut terlibat secara aktif di dalam politik. Pentingnya partisipasi politik masyarakat ini dalam pemilihan umum sebagai salah satu keberhasilan pemilihan umum itu sendiri. Maka perlu adanya evaluasi disetiap pemilu yang di adakan 5 Tahun sekali untuk menciptakan keberhasilan dalam mengadakan pemilihan umum di setiap daerah Indonesia. (Miaz, 2012:20)

Hubungan Partisipasi Politik dan Prilaku Pemilih

Wujud hubungan antara partisipasi politik warga masyarakat (baik muda-tua, desa-kota, dan lain-lain) dalam pemilihan umum. Hubungan antara konsep partisipasi politik dan teori prilaku pemilih adalah entitas yang saling mengisi dan mewujudkan dalam hubungan saling timbal balik secara positif. Pertama, tahap partisipasi politik sebuah Negara dapat diukur mengikut kegiatan yang dilakukan oleh warga Negara untuk memengaruhi tindakan dan keputusan pemerintah. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah memilih dalam pemilihan umum. Memilih merupakan salah satu indikator yang penting untuk melihat partisipasi politik warga karena ia merupakan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat. Kecendrungan warga untuk turut serta dalam pemilihan umum menunjukkan wujudnya kesadaran politik dan nilai demokratis. (Agustino 2020:107)

2. Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Pemilihan Umum Serentak 2019

Peran KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat sudah di atur dalam pasal 10 undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum dan pasal 2 keputusan presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan organisasi dan tata kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum.
3. Membentuk panitia pemilihan Indonesia yang disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS.
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.
5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan dan mensistematikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum.
7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

Dalam hal ini KPU Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan Tugas dan Wewenang KPU itu sendiri dilihat dari meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada pemilu serentak 2019 yang lalu mencapai 88,61% yang mana pada pemilu-pemilu sebelumnya dari tahun 2014 partisipasi politik masyarakat Kota Bandar Lampung itu tidak pernah memenuhi target dan melebihi target seperti pemilu serentak 2019 yang lalu melalui visi & misi program KPU Kota Bandar Lampung itu sendiri.

Berikut Program KPU Kota Bandar Lampung :

1. Mahan Demokrasi (Rumah Demokrasi)

Mahan demoktasi atau rumah demokrasi merupakan sebagai rumah pintar dan pusat pendidikan pemilih menjelang pemilihan kepala daerah 2020 ini. Rumah pilkada ini merupakan suatu gagasan dari KPU RI yang berkeinginan memiliki

program yang fokus memberikan literasi dan pembelajaran kepada pemilih, “kata ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triyadi, di Bandar Lampung. Rumah demokrasi ini kegiatan yang dilakukan rutin oleh KPU Kota Bandar Lampung targetnya masyarakat umum dan terutama pelajar/mahasiswa.

2. Relawan Demokrasi

Relawan Demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kota Bandar Lampung dan di rekrut secara umum yang terdiri dari 9 sekmntasi sebagai berikut:

1. Mewakili pemilih pemula dari pelajar dan mahasiswa
2. Basis keluarga terdiri dari tokoh agama dan masyarakat
3. Tokoh agama
4. Tokoh masyarakat
5. Pemilih disabilitas
6. Kelompok marjinal
7. Kelompok perempuan
8. Netizen selebgram
9. Kelompok komunitas dari olahraga budaya dll,

Relawan demokrasi ini tugas nya adalah ikut membantu mensosialisasikan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2019.

3. Aplikasi Gerbang Demokrasi KPU Kota Bandar Lampung

KPU Kota Bandar Lampung meluncurkan aplikasi sistem informasi pilkada 2020. Aplikasi yang diberi nama Gerbang Demokrasi ini memuat konten terkait informasi dan tahapan penyelenggaraan Pilkada Bandar Lampung. Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triyadi mengatakan aplikasi yang dapat diunduh di playstore ini adalah terobosan pelayanan kepemiluan yang dilakukan pihaknya. (<https://www.lampost.co/berita-kpu-bandar-lampung-luncurkan-aplikasi-gerbang-demokrasi.html> di akses sabtu 26 September 2020 15:50 WIB).

Ini adalah program unggulan yang ada di KPU Kota Bandar Lampung selain Rumah Demokrasi dan Relawan Demokrasi yang juga merupakan program dari KPU sendiri. Aplikasi gerbang demokrasi ini juga mempermudah masyarakat Kota Bandar Lampung dalam mengakses kegiatan KPU Kota Bandar Lampung serta dapat melihat langsung profil masing-masing dari para Calon Wali Kota dan Visi & Misi mereka.

Masyarakat Kota Bandar Lampung juga dapat langsung mengunduh aplikasi Gerbang Demokrasi ini di Play Store dan App Store untuk bisa langsung memeriksa apakah sudah terdaptar di DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Selain itu juga KPU Kota Bandar Lampung memili beberapa cara untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat itu sendiri sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat dan pemilih pemula
2. Menyebar brosur –brosur
3. Membuat bener atau ajakan untuk tidak Golput di seluruh wilayah kerja KPU Kota Bandar Lampung
4. Sosialisasi mobil keliling
5. Melakukan simulasi pemilu
6. Menggunakan alat peraga untuk pemilih disabilitas

“Menurut Dedy Triyadi Ketua KPU Kota Balam meningkatnya partisiasi politik masyarakat pada pemilu 2019 yang lalu selain program unggulan yang telah dilaksanakan oleh KPU sendiri di karnakan adanya putusan MK yang membolehkan memilih bukan di domisili nya sendiri seperti mahasiswa dan masyarakat yang sedang bekerja di luar daerah nya bisa mengurus yang namanya A5 surat untuk memilih langsung di TPS yang ada di daerah tersebut tetapi A5 tersebut hanya bias memilih 2 surat suara dari 5 surat suara yang tersedid saat pemilu 2019 yang lalu DPRD Kab/Kota DPRD Provinsi DPRD RI DPD RI dan Presiden dan Wakil Presiden dari 5 surat suara tersebut masyarakat dan mahasiswa yang dariluar daerah bisa memilih dengan mengurus A5 dan mendapatkan surat suara DPD RI dan presiden dan wakil presiden. Selain adanya putusan MK tersebut untuk bisa mengurus pindah memilih dengan Mengurus A5 tersebut adanya program relawan demokrasi yang dibentuk oleh kpu kota Bandar lampung dan di rekrut secara umum yang terdiri dari 9 sekmentasi”

Jadi dapat disimpulkan KPU Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan program dan sosialisasi kepada masyarakat Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum serentak 2019 yang lalu dan memberikan fasilitas dalam melaksanakan tugas dan wewenag KPU itu sendiri sehinggi memberikan hasil yang maksimal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum serentak 2019 yang lalu. Bias kita lihat dari table partisipasi politik masyarakat dari pemilihan presiden dan wakil presiden 2014

pemilihan wali kota 2015 pemilihan gubernur 2018 dan pemilihan umum serentak 2019 yang lalu partisipasi politik masyarakat meningkat dan di pemilihan umum serentak 2019 yang lalu melebihi target Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung,

Hal ini senada dengan Kasubag Teknis Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Baddarudin Amir, beliau menyatakan bahwa:

“KPU Kota Bandar Lampung melakukan sosialisai terhadap masyarakat melakukan literasi dan edukasi terkait dengan memilih pemilih cerdas pemilih rasional yang memilih karena bukan sesuatu atau pragmatis tetapi dalam pelaksanaannya partai politik ini juga memberikan janji janji politik dengan memberikan sembako, uang dll itu yang membuat pelaksanaan di lapangan yang tadinya masyarakat memilih dengan kesadaran politiknya tetapi memilih karena ada sesuatu itu yang berpengaruh kepada partisipasi masyarakat sendiri.”

Hal ini juga sesuai dengan pengamatan peneliti dilapangan bagaimana KPU Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan program-program dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum serentak 2019 yang lalu di wilayah Kota Bandar Lampung dan dibantu juga oleh relaawan demokrasi yang di rekrut KPU dan perangkat kelurahan/desa kecamatan di Bandar Lampung.

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan strategi dan peran KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum serentak 2019 yang lalu. Guna untuk mendapatkan penelitian ini, peneliti sudah melakukan wawancara secara langsung dan mendalam berdasarkan teori Koteen Salusu (1996:104-105), terdapat beberapa tipe macam strategi yaitu sebagai berikut:

Strategi Organisasi (Corporate Strategy)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif startegis yang baru. Pembahasan-pembahasan ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa. Disini kita bias lihat dari Visi & Misi KPU Kota Bandar Lampung dalam mencapai target partisipasi politik masyarakat di setiap dilaksanakan nya pemilihan umum di Kota Bandar Lampung.

Strategi Program (Program Strategy)

Strategi ini merupakan perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Ada dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan dan diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi. Program-program yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung sudah cukup baik dalam hal ini kita bias lihat di program unggulan yang menunjang program KPU itu sendiri.

Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial. Yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya. Disini KPU Kota Bnadar Lampung membentuk yang namanya Relawan Demokrasi untuk menambah sumber daya yang ada di KPU Kota Bandar Lampung selain yang memang sudah ada di KPU itu sendiri untuk memaksimalkan program-program yang ada di KPU.

Strategi Kelembagaan (Instutional Strategy)

Fokus dari strategi kelembagaan ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis. KPU Kota Bandar Lampung memberikan inisiatif program yang kreatif dalam hal untk menunjang peningkatan partisipasi politik masyarakat seperti membentuk program-program kerja yang menarik dan inovatif sesuai kebutuhan zaman seperti di era digital saat ini seperti yang sudah dilakukan KPU Kota Bandar Lampung membuat Aplikasi Gerbang Demokrasi untuk mempermudah masyarakat Kota Bandar Lampung mengakses informasi tentang pemilihan umum di situs KPU Kota Bandar Lampung.

3. Kendala Komisi Pemilihan Umum Di Kota Bandar Lampung Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Pemilu Sebelumnya

Kendala komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum menurut Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triyadi

“Kendala dalam pemilu sebelumnya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat kata Dedy Triyadi ketua KPU Kota Bandar Lampung melakukan sosialisai terhadap masyarakat melakukan literasi dan edukasi terkait dengan pemilih pemilih cerdas pemilih rasional yang memilih karena bukan sesuatu atau pragmatis tetapi

dalam pelaksanaannya partai politik ini juga memberikan janji janji politik dengan memberikan sembako, uang dll itu yang membuat pelaksanaan di lapangan yang tadi nya masyarakat memilih dengan kesadaran politik nya tetapi memilih karena ada sesuatu itu yang berpengaruh kepada partisipasi masyarakat sendiri”

Di lihat dari perilaku pemilih itu ada 4 komponen perilaku pemilih dalam riset KPU Kota Bandar Lampung sendiri pada Pilgub 2018 yang lalu sebagai berikut:

1. Pemilih yang anpolitik golput yang tidak percaya terhadap politik itu sekitar 10 %
2. Pemilih yang konperpatif 10%
3. Ideologis yang memilih karena kesukaan keluarga organisasi dll sekitar 15 %
4. Pemilih pragmatis 35%

Tetapi masih banyak Pemilih rasional di kota balaam yang melihat figur visi misi melihat konsep maupun progja 30%

Inilah tantangan KPU Kota Bandar Lampung angka pemilih rasional atau pemilih cerdas yang disebut oleh KPU itu yang harus terus dilakukan literasi edukasi maupun sosialisasi untuk memilih itu bukan karena sesuatu tetapi memang hak politik kita sendiri.

Pendapat Risma Mauli dari Kasubbag Program KPU Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa :

“Pembentukan relawan demokrasi dari 9 sektektasi disetiap kecamatan dan kelurahan yang ada di Bandar Lampung bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menurunkan angka suara tidak sah. Cara nya mereka bertugas turun ke wilayah domisili relawan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program yang telah dijalankan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, serta menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi khususnya Pada pemilihan umum 2019 yang lalu .”

Kendala lainya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di pemilihan umum masih kurang sadarnya masyarakat Kota Bandar Lampung dalam memberikan Hak suara nya Hak untuk memilih pada saat pelaksanaan Pemilu untuk datang ke TPS

(Tempat Pemungutan Suara) dikarenakan masih banyak warga yang memilih untuk bekerja mencari uang karena beranggapan pergi ke TPS hanya membuang-buang waktu terutama masyarakat menengah kebawah.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan yang telah dijabarkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum serentak 2019 yang lalu bahwa selain adanya peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilu serentak 2019 yang lalu di pengaruh adanya putusan Mahkamah Konsitusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 210 ayat 1 terkait aturan batas maksimal diperbolehkan pemilih pindah TPS. Melalui mengurus surat yang nama nya A5. Dalam melakukan pindah memilih ini masyarkat yang bukan domisili Kota Bandar Lampung bias memilih di Bandar Lampung tetapi hanya mendapatkan 2 surat suara dari 5 suarat suara pada saat pemilahn umum serentak 2019 yang lalu yaitu kertas suara warna abu-abu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, kertas warna kuning untuk memilih DPD RI dan di dukung adanya program-program unggulan di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung seperti Aplikasi Gerbang Demokrasi, Relawan Demokrasi, Mahan Demokrasi. Aplikasi Gerbang Demokrasi ini mempermudah masyarakat Kota Bandar Lampung dalam mengakses kegiatan KPU Kota Bandar Lampung dan visi & Misi para calon kandidat. Dan mengetahui data diri kita sudah terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) di domisili pemilih masing-masing dan Kendala Komisi Pemilihan Umum di kota Bandar lampung untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di pemilu sebelumnya dari prilaku pemilih itu ada 4 komponen prilaku pemilih dalam riset KPU Kota Bandar Lampung sendiri pada Pilgub 2018 yang menjadi tantanangan KPU sendiri yaitu Pemilih yang anpolitis Golput (Golongan Putih), Pemilih yang konperpatif , Ideologis yang memilih karena kesukuan keluarga organisasi dll, Pemilih prakmatis.

2. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang

dianggap perlu dalam mengatasi upaya strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat dan Kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri yaitu :

Dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat disetiap pemilihan umum nya KPU Kota Bandar Lampung lebih banyak merekrut anggota Relawan Demokrasi dan ikut turut sertakan lebih banyak lagi komponen masyarakat ataupun public pigur dalam disetiap kegiatan program-program yang dilaksanakan oleh KPU kota Bandar Lampung dalam upaya meningkatkan partisipasi Politik masyarakat di setiap pemilu nya. Serta dapat melakukan kerja sama program-program bersama Bawaslu dan Aparat yang berwajib untuk mengatasi pemilih pragmatis yang ditimbulkan oleh oknum-oknum partai yang menjanjikan janji-janji politik kepada masyarakat dan memberikan bantuan sembako dengan unsure mengajak dan memilih salah satu kandidat dari oknum partai tersebut yang menyebabkan pemilih pragmatis yang memilih karan ada sesuatu hal bukan dari pribadi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Agustino Leo, 2020 “Pengantar Ilmu Politik” Intrans Publishing
- Anggara Sahya, 2013, “Sistem Politik Indonesi” Bandung, CV Pustaka Setia
- Andipate Anwar Arifin, 2017, “Demokrasi Dalam Ancaman Dan Bahaya” Jakarta, Nufu Citra Mandiri (NCM)
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, “Hukum dan Penelitian Hukum” Bandung, PT Citra AdityaBakti
- Busroh Abu Daud 1990, “Ilmu Negara” Jakarta, PT BumiAksara
- Furchan Arief, 1922, “Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif” Surabaya, Usaha Offset Printing
- Farida Nugrahani 2014, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan Bahasa” Solo, Cakra Books
- Hikam Muhammad 1999 “Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi Di Indonesia”

Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama

Isniati dkk, 2019 "Manajemen Strategik Intisari Konsep & Teori" Andi (Anggota IKAPI) Kadafi Muhammad dkk, 2016, "Metodologi Penelitian Hukum" Lampung, Perdana Publishing Pprasojo Lantip Diat, 2018 "Manajemen Strategi" Yogyakarta, UNY Pres

Sugiyono, 2018, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D" Bandung, ALfabet

B. Sumber Jurnal

Rosana Ellya, 2016, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia" Jurnal TAPIs Vol.12 No.1, Lampung IAIN Raden Intan Lampung

Kadir, 2017, "Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015" JOM FISIP Vol. 4 No 2. Riau Universitas Riau

Liando Daud M. 2016, "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat" Vol. 3 No.2.

C. Sumber Undang Undang

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang pemilihan umum

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum

D. Sumber Skripsi

Subekti Tia, 2014, "Skripsi dengan Judul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum" Magetan, Universitas Brawijaya

Putri Anisa, 2019, "Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019" Lampung Universitas Lampung

E. Sumber Internet

<https://kab-kulonprogo.kpu.go.id>, Tugas dan wewenang

<https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>

Id.m.wikipedia.org Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Lampungpro.co/POST/25242/dialog-proyekai-politik-2020-kpu-bandar-
lampung-memaksimakan-partisipasi-masyarakat-di-pilkada

F. Sumber Wawancara

Wawancara Ketua KPU Kota Bandar Lampung Bpk Dedy Triyadi.SE.SH Wawancara
Kasubag Teknis Pemilu & Hupmas Bpk Badarudin.S.H Wawancara Kasubbag
Program & Anggaran Risma Mauli.SE.,M.IP